

Urgensi integrasi SPM Sub-Urusan Bencana Ke dalam dokumen perencanaan daerah

Kegiatan: Rapat Sosialisasi Penerapan dan Pemantauan Pelaksanaan SPM Sub-Urusan Bencana

Oleh: **Drs. Sumedi Andono Mulyo MA. Ph.D**
Direktorat Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Rabu, 22 Juni 2022

Outline Pembahasan

PENDAHULUAN

KEBIJAKAN PB

INTEGRASI PRB DIDALAM PERENCANAAN

SPM-Sub Urusan Bencana

KESIMPULAN



Daftar Riwayat Hidup



Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D

Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 21 Januari 1965

Golongan: IVD

Alamat Rumah:

Komplek Bappenas,
Jl. Pertiwi II No. 18 Blok A 105, RT 03/RW01
Kedaung, Sawangan, Depok - 16516

Nomor Handphone: 085-880-596-992

Alamat Kantor:

Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas).
Jl. Taman Suropati No.2-4 Jakarta - 10310

Telp: 021-3193-4195 | **Fax:** 021-3193-4195

Email: sumedi@bappenas.com.dan
sumediam@gail.com

Pendidikan:

- Using Evidence for Smart Policy Design and Implementation (Government Think Thank). Harvard Kennedy School Executive Education, Boston, Amerika Serikat. 12-17 Nov 2017
- Leadership in Succession and Talent Management. Melbourne Business School - Mt Eliza Executive Education, Australia. 27 Okt – 1 Nov 2016
- **Postdoctoral.** Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Okt-Des. 2006
- **S3.** Doctor of Philosophy. Department of Urban Engineering, the University of Tokyo, Jepang. April 2001-Mar. 2004.
- **S2.** Master of Arts, Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Apr 1997-Mar. 1999.
- Postgraduate Diploma, Institute of Developing Economies Advanced School, Tokyo, Jepang. Sept. 1994-Mar. 1995.
- **S1.** Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Juni 1984-Juli 1989.

Pekerjaan:

- **Direktur** Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Sept 2020-Sekarang
- **Direktur** Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Jan 2019-Sept 2020
- **Direktur** Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappenas. Sept 2016-Januari 2019
- **Kepala Sub-direktorat**, Direktorat Pengembangan Wilayah, Bappenas. Januari 2006-September 2016
- **Kepala Sub-Direktorat**, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Bappenas. Mei 2004-Januari 2006
- **Kepala Bagian**, Biro Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas. Des. 2000-Mei 2004
- **Kepala Bagian**, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan, Bappenas. Mei 1999-Desember 2000
- **Kepala Sub Bagian**, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan, Bappenas. Maret 1994-Januari 1997
- **Staf Perencana**, Biro Analisa Ekonomi dan Statistik, Bappenas 1991-Maret 1994



Pesan Utama

Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana kedalam dokumen perencanaan daerah yang berdasarkan pada bukti dan pengetahuan dengan pendekatan wilayah secara terpadu

ISU



Adanya perbedaan tingkat kerentanan dan ketangguhan masyarakat, dan tingkat kerawanan bencana di setiap daerah.



Adanya ketidaksamaan tingkat pemahaman dan pengetahuan kebencanaan di setiap daerah.



Adanya ketidakseimbangan peralatan dan infrastruktur kebencanaan di setiap daerah.



Adanya ketidaksamaan komitmen dan dukungan dalam manajemen bencana di setiap daerah.

SOLUSI



Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan harus memperhatikan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dan daerah.



Pengembangan manajemen pengetahuan kebencanaan (*knowledge management*) didukung dengan penguatan literasi, edukasi, narasi dan budaya sadar bencana di setiap wilayah.



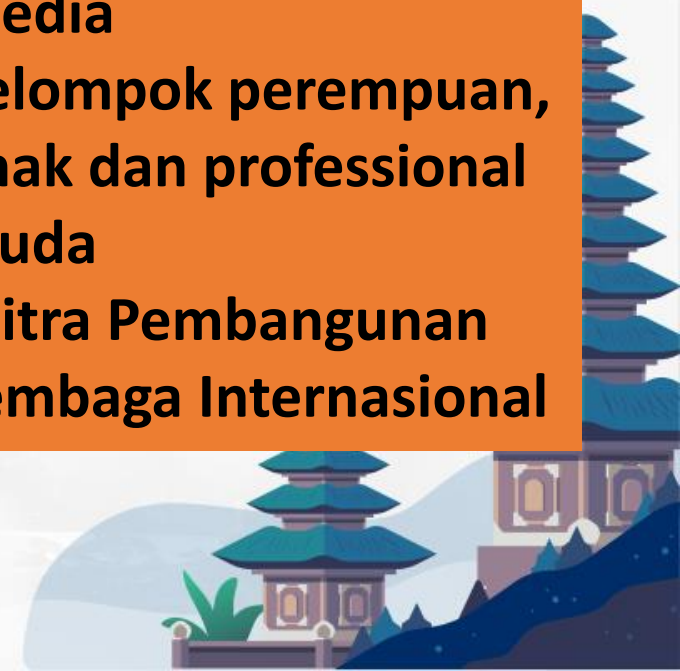
Pemetaan dan analisis kebutuhan (*gap analysis*) *hard and soft infrastructure* kebencanaan termasuk sistem deteksi dini dan keterkaitan *upstream-downstream* kebencanaan di setiap wilayah.



Penguatan kerjasama *pentahelix* (Pemerintah-Pemerintah Daerah-Perguruan Tinggi-Pelaku Usaha-Organisasi Masyarakat-Media) dan Dukungan DPRD dalam pembiayaan terpadu.

Mengoptimalkan Momentum Menguatkan Kolaborasi Resiliensi Berkelanjutan

1. **Diseminasi dan Sosialisasi Hasil GPDRR dan Masukan G20**
 2. **Internalisasi Hasil GPDRR ke dalam kebijakan dan rencana aksi**
 3. **Pendalaman Aksi FGD, Worskhop dan Seri Diskusi**
 4. **Penguatan Forum Resiliensi Berkelanjutan**
 5. **Pengembangan Model (Modelling) Resiliensi Berkelanjutan: Proyeksi, Skenario, Simulasi dan Rencana Investasi**
 6. **Persiapan Penyusunan RPJPN 2026-2045 dan RPJPD**
 7. **Persiapan Penyusunan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD**
 8. **Pengembangan dan Perluasan Kerjasama Internasional → Diplomasi, AMDRR, dan Forum Internasional Lainnya.**
- **Kementerian/Lembaga**
 - **Pemerintah Daerah**
 - **Perguruan Tinggi**
 - **Pelaku Usaha**
 - **Media**
 - **Kelompok perempuan, anak dan professional muda**
 - **Mitra Pembangunan**
 - **Lembaga Internasional**





Produk Bidang Substansi



Official Statement Member State

Official Statement of the Indonesian Delegation in the Official Statement session

STATEMENTS OFFICIAL GOV 27 May 2022

Source:
Indonesia - government
Speaker:
H.E. Suharyanto
Head of the National Disaster Management Authority of Indonesia



Butir Wicara keterangan pers



Butir Wicara untuk Keterangan Pers
Letjen TNI Suharyanto
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Jumat, 27 Mei 2022

Co-Chair's Summary



Co-Chairs' Summary

Bali Agenda for Resilience

*From Risk to Resilience:
Towards Sustainable Development for All
in a COVID-19 Transformed World*



7 Rekomendasi Agenda Bali





Partisipasi dalam Inovation Platform



Tim Bappenas di dukung BNPB, BRIN, BMKG dan ESDM mendapatkan kesempatan 2 booth dalam Inovation Platform yang diisi dengan Produk K/L kontributor dan Simulasi Gempa.



HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLAHRAGA HUMANIORA LIFESTYLE HIBURAN

Teknologi Virtual Reality mengisi paviliun Indonesia di GPDRR

© Jumat, 27 Mei 2022 20:13 WIB





Platform Indonesia Pavilion



<https://www.indonesiapavilion2022.com/virtual/>

Portal ini merupakan inisiasi platform showcase produk K/L dalam Kebencanaan. Dan diharapkan bisa kontinu





Partisipasi dalam Rumah Resiliensi



Tim Bappenas mendukung rumah resiliensi dengan mendirikan Planogram yang berisikan produk K/L yang juga ditampilkan dalam innovation Platform





Dokumentasi Bidang Substansi



for Disaster Risk
From Risk to Resilient
Towards Sustainable Development for All in a
Bali - Indonesia | 23 - 28



Penanganan Bencana Dusun Krajan, Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang

1. FAKTA

1 Rumah terdampak gempa di Kab Malang: sekitar 6.000 unit.

Tenda Pengungsian 1 dan Dapur Umum 4

2 Jumlah KK terdampak: 474 KK
Rumah rusak berat di Dusun Krajan: 427 unit, rusak sedang: 115 unit, rusak ringan: 250 unit, sarana keagamaan: 1 unit

3 Warga bergotong royong mulai memperbaiki rumah dengan memanfaatkan sisa bangunan yang masih dapat dipakai

2. MASALAH

Terbatasnya pengetahuan tentang standar bangun tahan gempa menyebabkan struktur rumah tidak solid.

Kurangnya tenaga verifikasi bangunan menyebabkan terlambatnya proses penilaian kerusakan dan kondisi bangunan

Perlunya pengembangan EWS agar tetap berfungsi baik dan penyiapan SDM operator EWS yang berintegritas.

Perlunya integrasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten Malang



3. REKOMENDASI

- 1 Melakukan verifikasi dan perbaikan bangunan rusak, dan sekaligus menyediakan dapur umum (Pemerintah Desa dan Pemda Kab: 1-3 bulan)
- 2 Melakukan pembersihan dan penyiapan pembangunan kembali rumah yang rusak akibat gempa (Dinas PUPera, BPBD Kabupaten Malang, Pemerintah Desa dan Dinas lainnya: 3-8 bulan)
- 3 Melanjutkan pendampingan kepada anak-anak korban bencana (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Desa: 3-8 bulan)
- 4 Memperbaharui kajian dan peta risiko bencana sebagai acuan penyusunan RPJMD dan RTRW Kabupaten Malang (Bappeda dan BPBD Kabupaten Malang dan Dinas lainnya): 3-6 bulan)
- 5 Memperkuat peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan, LSM dalam sosialisasi risiko kebencanaan (Pemda: 12 bulan)
- 6 Memperkuat peran Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam sosialisasi pengetahuan dan risiko kebencanaan (Kemendes PDT dan Dinas PMD: 12 bulan)
- 7 Mengembangkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat dan desa, dan sistem informasi kebencanaan (BNPB, Kemdes PDT dan Pemda (Bappeda dan BPBD): 12 bulan)

Mitigasi dan Penanganan Bencana Kabupaten Garut dan Tasikmalaya

1. FAKTA

1 Korban terdampak banjir Kab Garut: ±768 KK/ 2.684 Jiwa

2 Kabupaten Garut
Rumah rusak berat: 165 unit, sedang: 281, ringan: 694, sarana kesehatan: 13, sarana pendidikan: 13, sarana keagamaan: 31 unit

3 Jalan rusak berat: 30 titik, tembok penahan tanah: 30 titik, jembatan rusak berat: 25 unit, dan Sawah terendam 3 ha

4 Korban meninggal: 1 orang, luka ringan: 2 orang, terdampak banjir: sekitar 361 KK

5 Kabupaten Tasikmalaya
Rumah rusak berat: 27 unit, sedang: 23, ringan: 19, sarana pendidikan: 2, sarana keagamaan: 1 unit

6 Jalan rusak berat: 1 titik, jalan terendam: 15 titik, jembatan rusak berat: 1 unit, dan kolam ikan terendam: 8 unit

2. MASALAH

Terbatasnya pengetahuan tentang risiko bencana yang menyebabkan rendahnya kesadaran bencana dan kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

Masih adanya penebangan liar di daerah perbukitan tanpa diikuti penanaman kembali yang menyebabkan bertambah luasnya lahan kritis.

Belum ditaatinya RTRW dan tata guna lahan, serta alih fungsi lahan yang menyebabkan daya dukung lahan.

Belum adanya dan atau belum berfungsinya sistem peringatan dini (EWS) dengan baik.

Terbatasnya tempat dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.

Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antardinas dalam pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana (BPBD, Bappeda,, PUPera, Perhubungan, Pemberdayaan Masyarakat, dan dinas lainnya).



3. REKOMENDASI

1 Meningkatkan pendidikan kebencanaan melalui kurikulum pendidikan dan pelatihan (Pemda Provinsi dan Kab/Kota : 12 bulan)

2 Memperkuat peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan, LSM dalam sosialisasi risiko kebencanaan (Pemda : 12 bulan)

3 Memperkuat peran Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam sosialisasi pengetahuan dan risiko kebencanaan (Kemendes PDT dan Dinas PMD: 12 bulan)

4 Mengembangkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat dan desa, dan sistem informasi kebencanaan (BNPb, Kemdes PDT dan Pemda (Bappeda dan BPBD): 12 bulan)

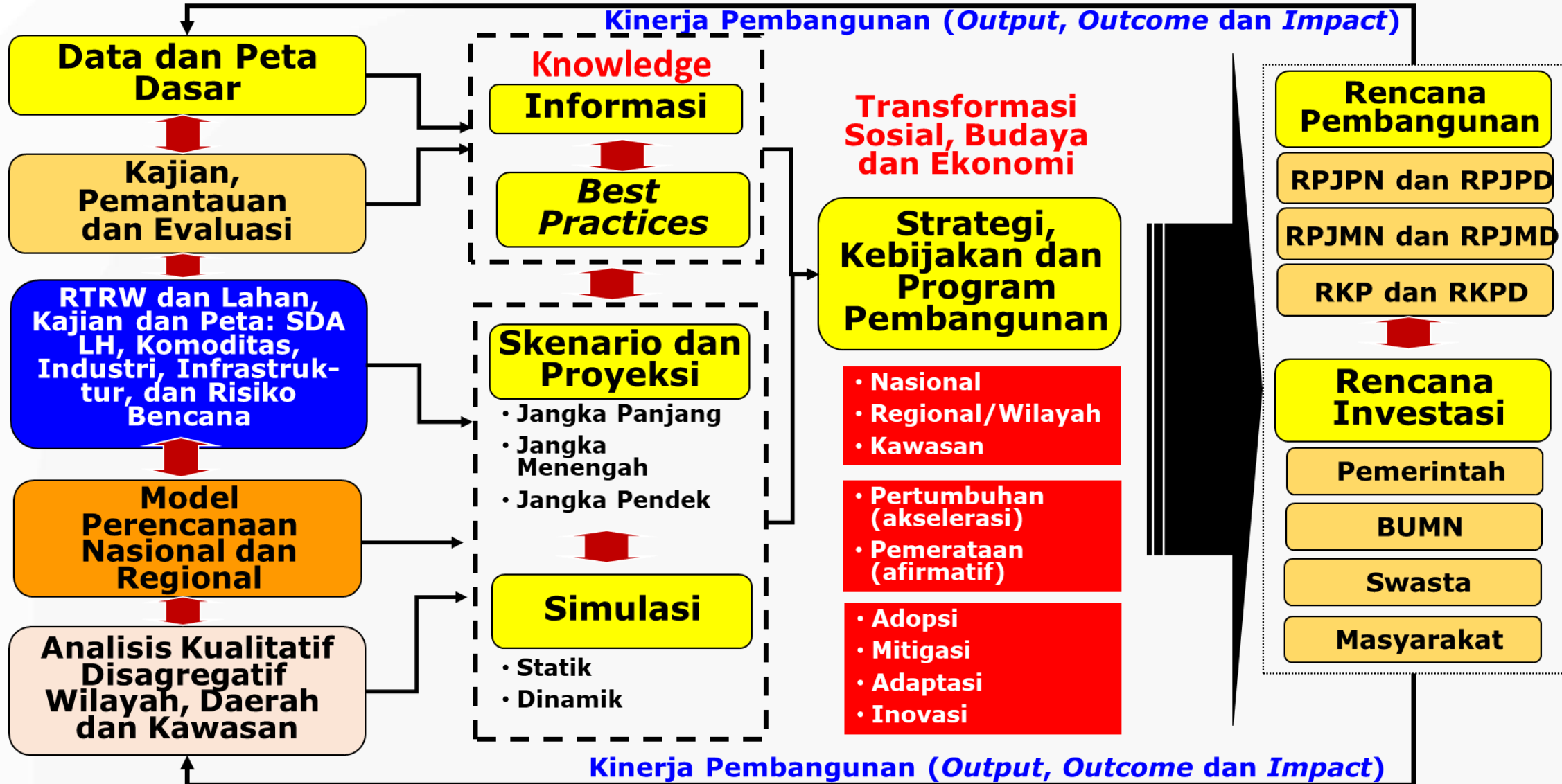
5 Mempercepat pembangunan jalur dan tempat evakuasi (Kementerian PUPera dan Dinas PUPera: 12 bulan)

6 Menyiapkan peta lahan dan risiko bencana, serta mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam dokumen RTRW, RPJMD dan RKPD (Pemprov dan Pemkab (Bappeda, PUPera, BPBD dan dinas lainnya): 12 bulan)



Alur Pikir Perencanaan Pembangunan

Manajemen Informasi, Skenario, Strategi dan Investasi



PENDAHULUAN

Komitmen PRB Global – Nasional hingga Lokal



Megatren: Tantangan Masa Depan

Demografi Global

Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar (Asia 55%). Tren demografi global mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut.

Urbanisasi Dunia

Penduduk dunia yang tinggal di perkotaan mencapai 66% dengan 95% penambahan terjadi di *emerging economies*.

Peranan *Emerging Economies*

Output negara berkembang 71% dari total output dunia dengan Asia sebagai pendorong utama sebesar 54%.

Perdagangan Internasional

Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan 6% per tahun.

Keuangan Internasional

Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi *multi currency*. Aset keuangan *emerging economies* diperkirakan melebihi negara maju.



Kelas Menengah

Jumlah *middle* dan *upper class* lebih dari 84 persen (8,1 miliar) yang didominasi oleh Asia dan Amerika Latin.

Persaingan Sumber Daya Alam

Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan merebutkan SDA. *Technological advancement* meningkatkan efisiensi eksploitasi SDA.

Teknologi

Tren perubahan teknologi yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, *wearable devices*, energi terbarukan, otomatisasi, dan *artificial intelligence*.

Perubahan Iklim, Pandemi dan Bencana

Tantangan pemanasan global semakin besar (kejadian ekstrim dan perubahan iklim jangka panjang. Suhu global meningkat 3-3,5% tanpa adanya usaha menurunkan emisi. Risiko bencana dan pandemic meningkat.

Perubahan Geopolitik

Peningkatan peranan Cina, kerentanan di kawasan Timur Tengah, serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu

Indonesia 2045: Transformasi dan Akselerasi

VISI INDONESIA 2045 DAN KELUAR DARI MIDDLEINCOME TRAP

INDONESIA 2045 Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur

Pidato Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019

Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja.

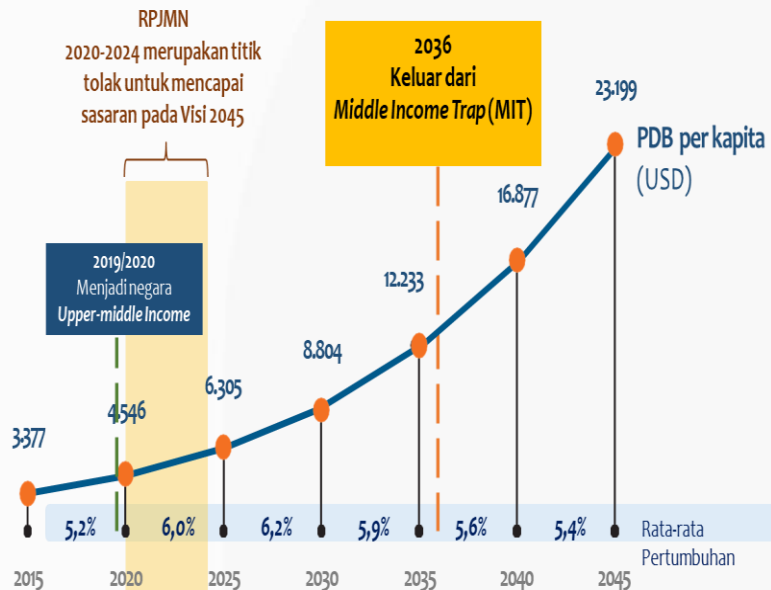
Tapi akan menjadi kesempatan besar, peluang besar, jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dan dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif.

Rata-rata pertumbuhan 2015-2045:

PDB Riil	PDB Riil / Kapita
5,7%	5,0%

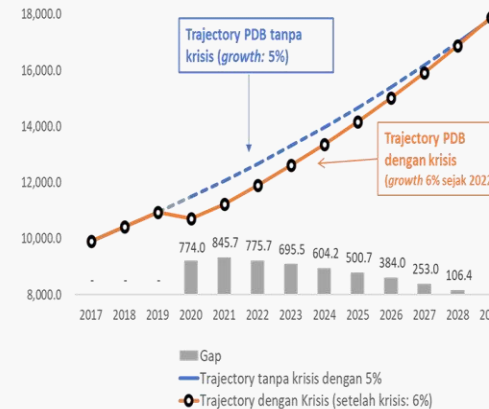
Tahun 2045:

Negara Maju dan PDB terbesar	Peranan KTI menjadi
Ke-5 (USD 7,4 triliun)	25%



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

PEMULIHAN EKONOMI DAN TRANSFORMASI SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI

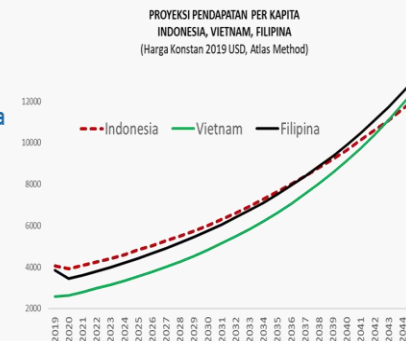


- Rata-rata pertumbuhan 6% sejak tahun 2022, akan mengembalikan Indonesia pada *Trajectory* PDB-nya pada tahun **2029**
- Tanpa pertumbuhan tinggi sekitar 6%, **Indonesia akan semakin lama** mengembalikan *trajectory* perekonomiannya seperti tanpa krisis

Tanpa redesign transformasi ekonomi, maka....

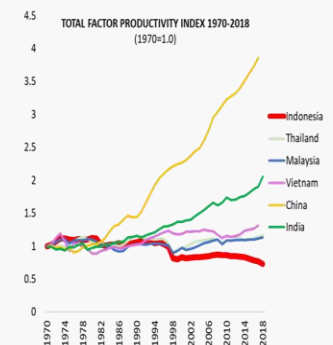
1

Pendapatan per kapita Indonesia akan "disalip" oleh Filipina pada tahun 2037 dan oleh Vietnam pada tahun 2043



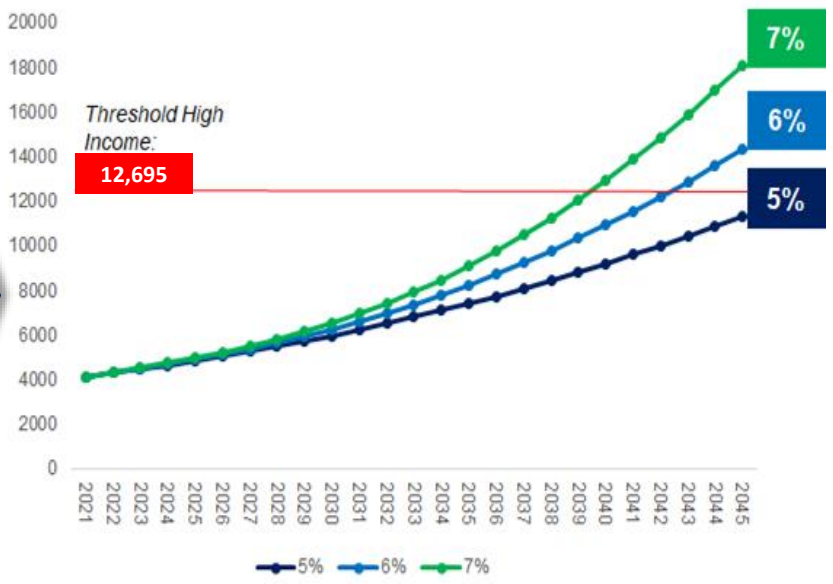
2

Tingkat produktivitas (*Total Factor Productivity*) akan terus menurun dan terendah di Kawasan Asia




Ekonomi Hijau sebagai bagian dari Strategi Transformasi Ekonomi untuk mendorong Indonesia lepas dari *Middle Income Trap* sebelum 2045

Proyeksi Pendapatan Per Kapita (USD per Kapita, Atlas Method)




Diperlukan adanya transformasi ekonomi, melalui pergeseran struktur ekonomi dari sektor kurang produktif ke sektor lebih produktif (industrialisasi), pergeseran produktivitas antar sektor.

Rencana Strate Transformasi Ekonomi

-  SDM berdaya saing
-  Produktivitas sektor ekonomi
-  Ekonomi hijau
-  Transformasi digital
-  Integrasi ekonomi domestik
-  Pemindahan IKN

Salah satu strategi transformasi ekonomi adalah melalui **Ekonomi Hijau dengan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim**

Pembangunan Rendah Karbon & Berketahanan Iklim menjadi “backbone” dalam Transformasi Ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau

Article 3.4 UNFCCC

Integrasi Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim dalam RPJMN 2020–2024

PRK & PBI sebagai Prioritas Nasional No. 6

PRK & PBI sebagai Arah Kebijakan ditetapkan RKP 2023

Pembangunan Rendah Karbon



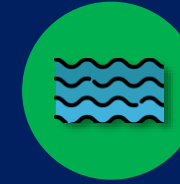
Penanganan Limbah & Ekonomi Sirkular



Pengembangan Industri Hijau



Pembangunan Energi Berkelanjutan



Rendah Karbon Laut & Pesisir



Pemulihan Lahan Berkelanjutan

Penurunan emisi GRK di tahun 2024:

27,3%

Intensitas emisi di tahun 2024:

31,6%



Circular Economy, merupakan salah satu tools untuk akselerasi penerapan pembangunan rendah karbon.

Pembangunan Berketahanan Iklim



Laut & Pesisir



Air

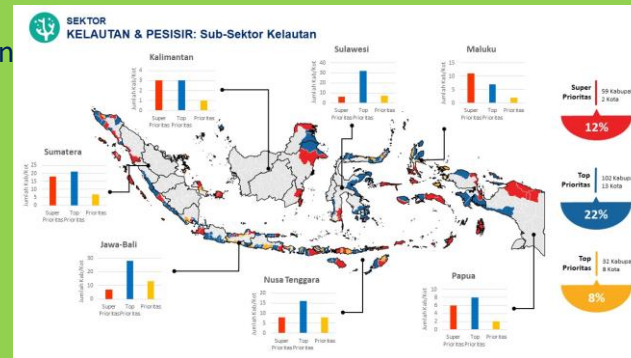


Pertanian



Kesehatan

Analisis terhadap sebaran lokasi prioritas aksi ketahanan iklim pada **4 sektor prioritas**



6 (enam) serial buku Pembangunan Berketahanan Iklim





Paradigma Resiliensi Berkelanjutan: ... Build Back Better, Safer dan Sustainable...

SDGs, Rantai Nilai dan Ekonomi Sirkular

PEMBANGUNAN YANG PRODUKTIF, INOVATIF, AMAN, BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF



Pembangunan
Ekonomi



Kesejahteraan
Masyarakat



Kelestarian
Lingkungan

Dalam mewujudkan pembangunan yang aman dan berkelanjutan, maka perlu pemanfaatan ruang dan langkah sistematis dan terencana dalam Pengurangan Risiko, Mitigasi, Adaptasi dan Investasi Berbasis Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim.



KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sendai Framework
for Disaster Risk Reduction
2015 - 2030



- 1 Memahami risiko bencana berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal
- 2 Memperkuat tata kelola penanganan risiko bencana untuk mengelola risiko bencana
- 3 **Berinvestasi dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) untuk ketahanan bencana yang berkelanjutan**
- 4 Meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan untuk Membangun Kembali dengan Lebih Baik dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi



Meningkatkan Ketahanan Bencana & Iklim

PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Indikator Outcome	Baseline	Target 2020	Target 2024
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	N/A	0,10	0,10



KP 1 Penanggulangan Bencana

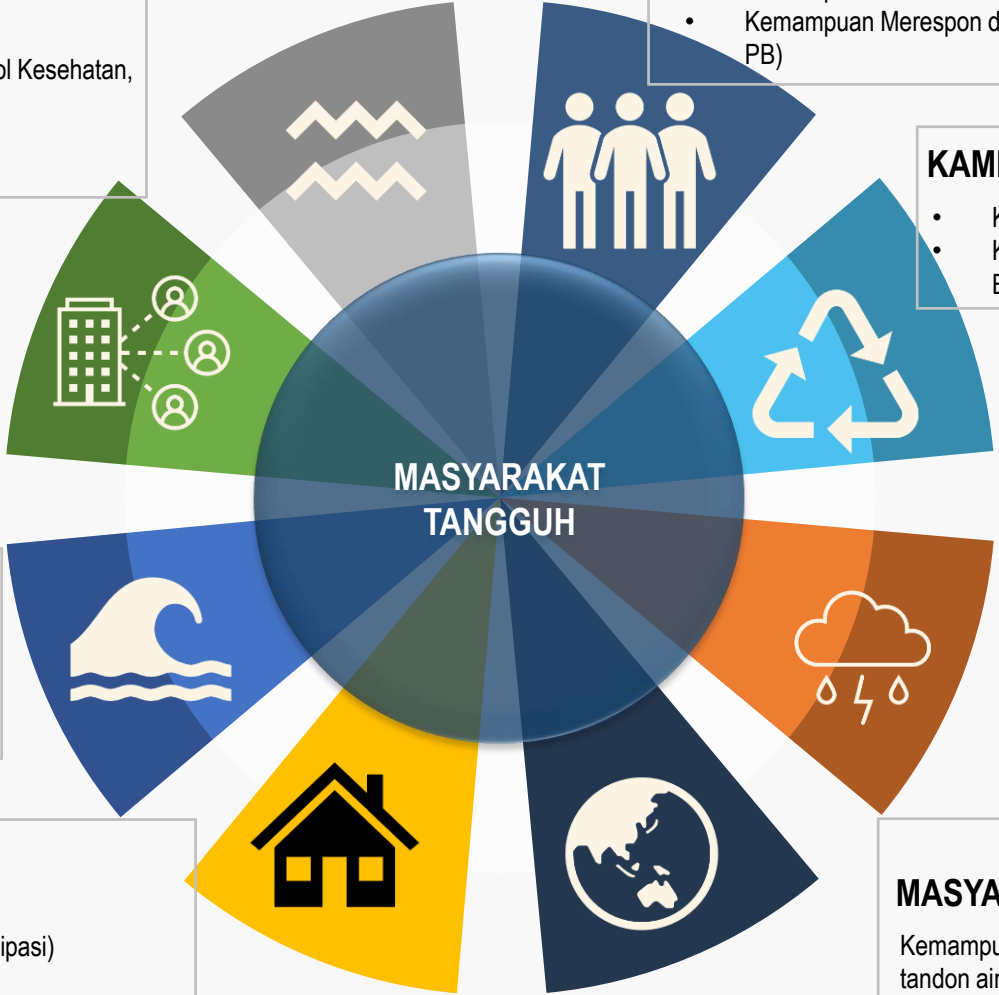
Indikator (Satuan)	Target 2020	Target 2024
• Rasio investasi PRB terhadap APBN (rasio)	0,36	1,36
• Persentase kelengkapan peralatan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis (persen)	90	100

Kebijakan penanggulangan bencana merupakan kebijakan yang menggabungkan beberapa kebijakan bersifat global sampai dengan kebijakan yang bersifat local, yang terdiri dari:

1. SDGs (Agenda perencanaan Global)
2. SFDRR (perencanaan PB Global)
3. RPJPN (Perencanaan jangka Panjang)
4. RIPB (perencanaan PB jangka Panjang)
5. RPJMN (perencanaan jangka menengah)
6. Renas PB (perencanaan PB jangka menengah)
7. RKP (perencanaan jangka pendek/tahunan)



Paradigma Tangguh: Penguatan Literasi, Edukasi dan Budaya Sadar Bencana, Ketahanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



DESA TANGGUH COVID/BENCANA – KEMENDES PDPT

- Sistem Komando Desa
- Relawan Menyusun buku panduan, penerapan protokol Kesehatan, sosialisasi
- Memahami risiko dan kerentanan

DESA TANGGUH BENCANA - BNPB

- Kemampuan Memahami Risiko Bencana (Banjir, Longsor, Karhutla, dst)
- Kemampuan Merespon dan Melakukan Aksi (Forum PRB, Sosialisasi, Relawan PB)

DESA SIAGA AKTIF - KEMENKES

- Kemampuan Memahami Risiko Kesehatan dan Respon
- Layanan kesehatan (Poskesdes, Kader Kesehatan desa) dan Penerapan PHBS

KAMPUNG SIAGA BENCANA - Kemensos

- Kemampuan Mengelola Kawasan bencana
- Kemampuan melaksanakan forum penguatan daerah (Taruna Siaga Bencana dan Pemuda Siaga Bencana)

DESA MANDIRI ENERGI - KEMEN ESDM
Inisiasi energi alternatif (PLTA Sederhana, Biogas sederhana, dst) untuk antisipasi kondisi darurat

DESA PESISIR TANGGUH - KKP
Kemampuan Merespon dan Melakukan Aksi (Menanam Mangrove, Menentukan waktu berlayar, membangun tanggul sederhana, dst)

DESA WISATA – KEMEN PAREKRAF
Inisiasi desa tematik Tangguh bencana (Edukasi dan partisipasi)

DESA MANDIRI PANGAN - KEMENTAN
Kemampuan Merespon dan Melakukan Aksi (lumbung pangan, bufferstock, tumpangsari, dst)

MASYARAKAT PEDULI API DAN KAMPUNG IKLIM - KLHK
Kemampuan Merespon dan Melakukan Aksi (Patroli hutan, deteksi api, parit dan tandon air, dst)

KEBIJAKAN PB

Arah Kebijakan Pemerintah 2023



Tema dan Arah Kebijakan Tahun 2023

Tema RKP Tahun 2023

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan



Termasuk Penanggulangan Bencana

Tema dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam Aspek Kewilayahan Tahun 2023

Mempercepat pemerataan pembangunan wilayah pesisir barat Sumatera dan daerah rawan bencana melalui pengembangan daerah 3T di Sumatera

Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketangguhan terhadap ancaman bencana alam di Kalimantan

Perbaiki sistem logistik/distribusi dan pengendalian harga pada komoditas strategis untuk mengantisipasi terganggunya pelayaran antarpulau akibat cuaca ekstrem dan gelombang laut yang tinggi di Maluku

Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan di Papua

Meningkatkan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam upaya penguatan mitigasi bencana di Jawa Bali

Menguatkan mitigasi bencana dan pemulihan pascabencana di Sulawesi Tengah

Menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara





Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2020-2024



Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024



PN 2: PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) KEWILAYAHAN

13. Pemulihan Pasca Bencana:

(Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)

Latar Belakang	1. Berbagai Kementerian/Lembaga memiliki akun kegiatan pasca bencana namun sampai saat ini belum mengajukan prioritas intervensi kegiatan per sektornya 2. Masih minimnya manajemen penanganan pasca bencana lintas sektor pembangunan					
Manfaat	1. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 2. Mempercepat pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana.					
Durasi	2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 50%	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 75%	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 90%	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 100%	-	Rp 15,2 Triliun • APBN: Rp 14,8 T • APBD: Rp 0,4 T
Pelaksana	BNPB, Kemen ESDM, Kemen KUKM, Kemendikbud, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemensos, Pemerintah Daerah					
Highlight Proyek	1. Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang social ekonomi (BNPB) 2. Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan pasca bencana (Kementerian KUKM) 3. Rekonstruksi Jembatan Palu 4 (Kementerian PUPR) 4. Pembangunan Ruang SD dan Kelas Baru (Kementerian Dikbud) 5. Pemulihan pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah (Pemerintah Provinsi)					



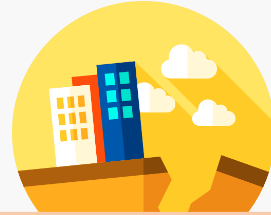
PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana & Perubahan Iklim

Kegiatan Prioritas 1: Penanggulangan Bencana



Pro-PN:

- 1) Penguatan Data, Informasi, & Literasi Bencana
- 2) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana
- 3) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan
- 4) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana
- 5) Penguatan Penanganan Darurat Bencana
- 6) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana
- 7) Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu



Program Prioritas 2: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Pro-PN:

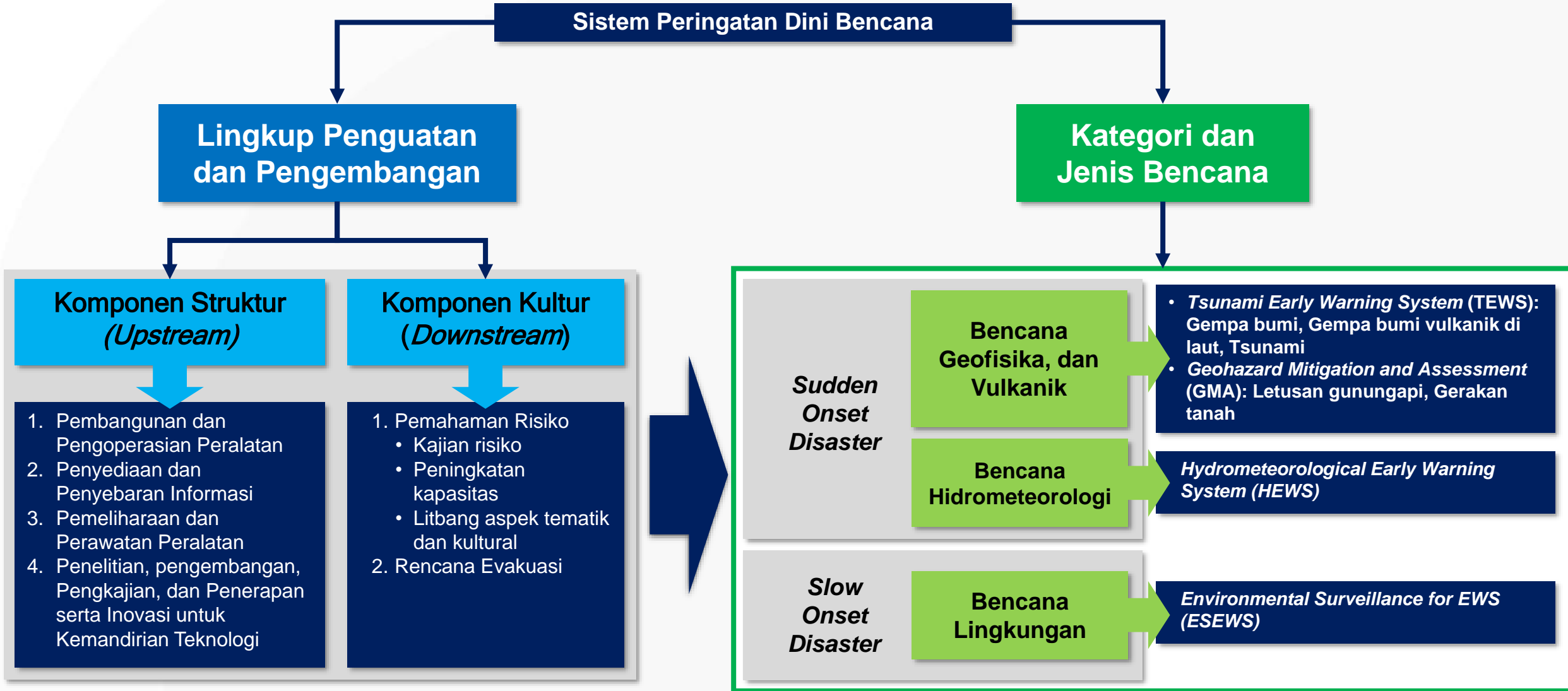
- 1) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan
- 2) Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim
- 3) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim
- 4) Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim



Kegiatan Prioritas 2: Peningkatan Ketahanan Iklim



Kerangka Logis *Major Project* Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana



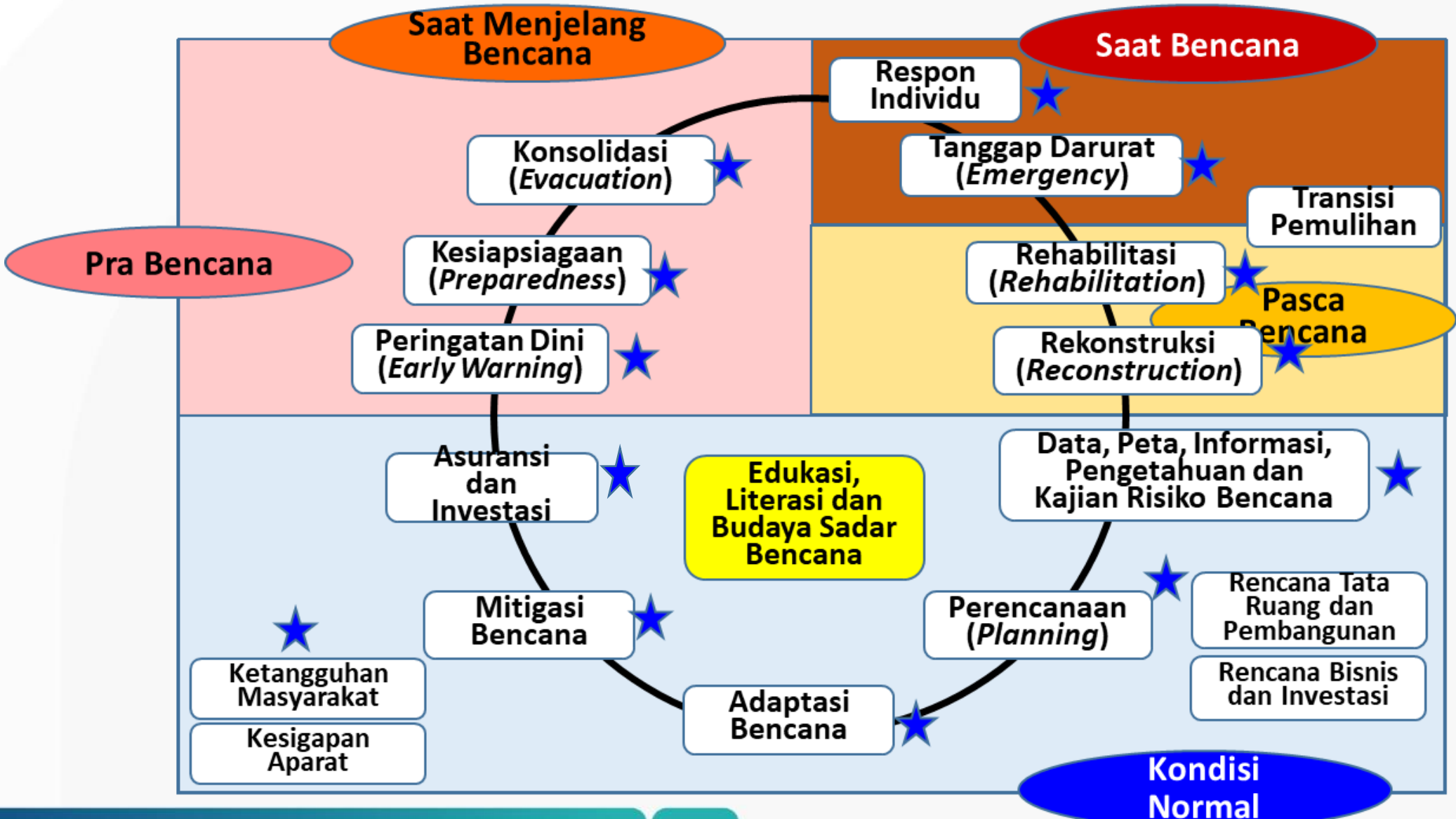
INTEGRASI PRB DIDALAM PERENCANAAN

- **Siklus Bencana, Alur Pikir Perencanaan,
penyelarasan**



Siklus Manajemen Bencana

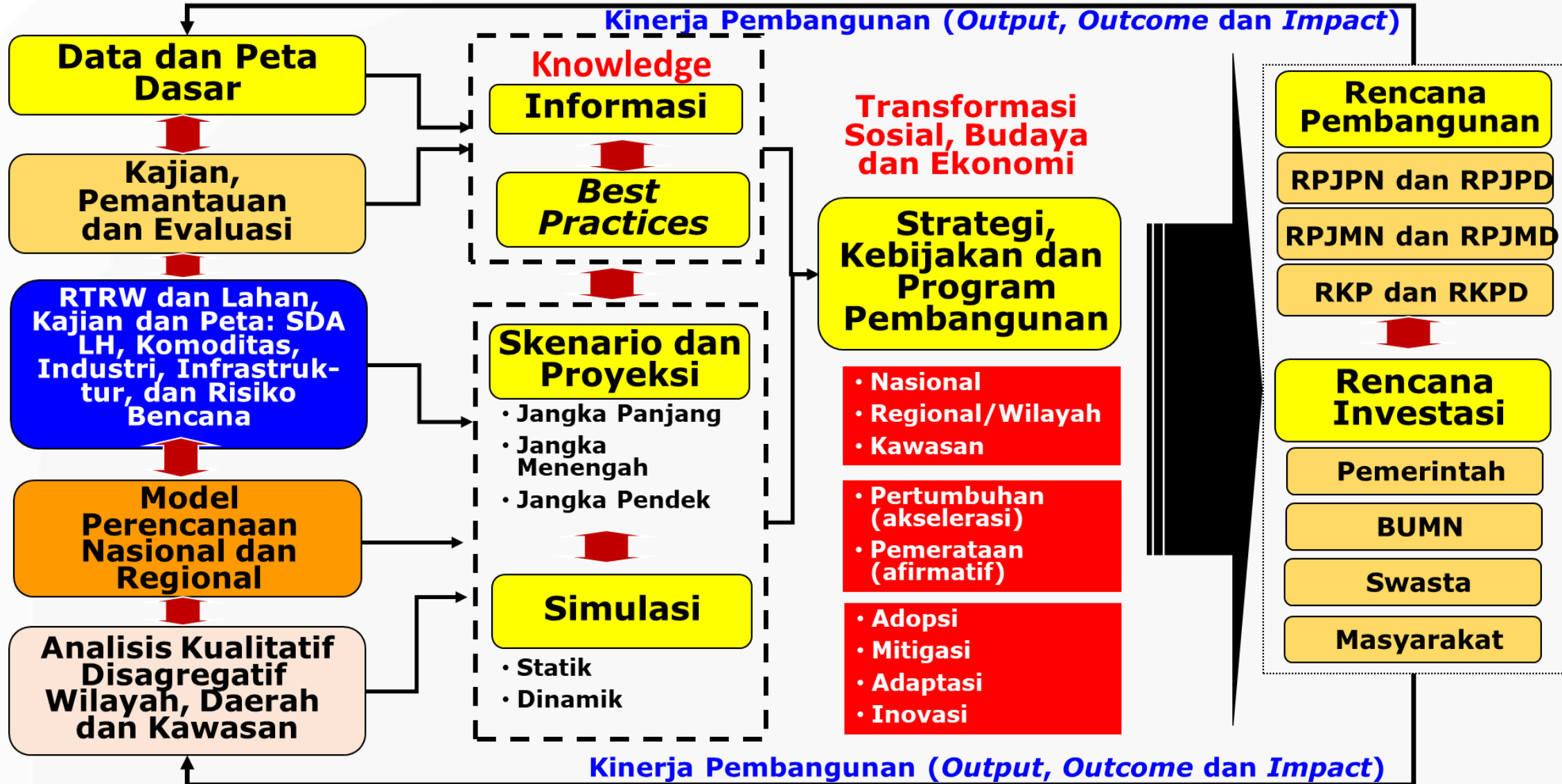
Perencanaan, Edukasi, Literasi, Adaptasi, Mitigasi dan Investasi





Alur Pikir Perencanaan Pembangunan

Manajemen Informasi, Skenario, Strategi dan Investasi





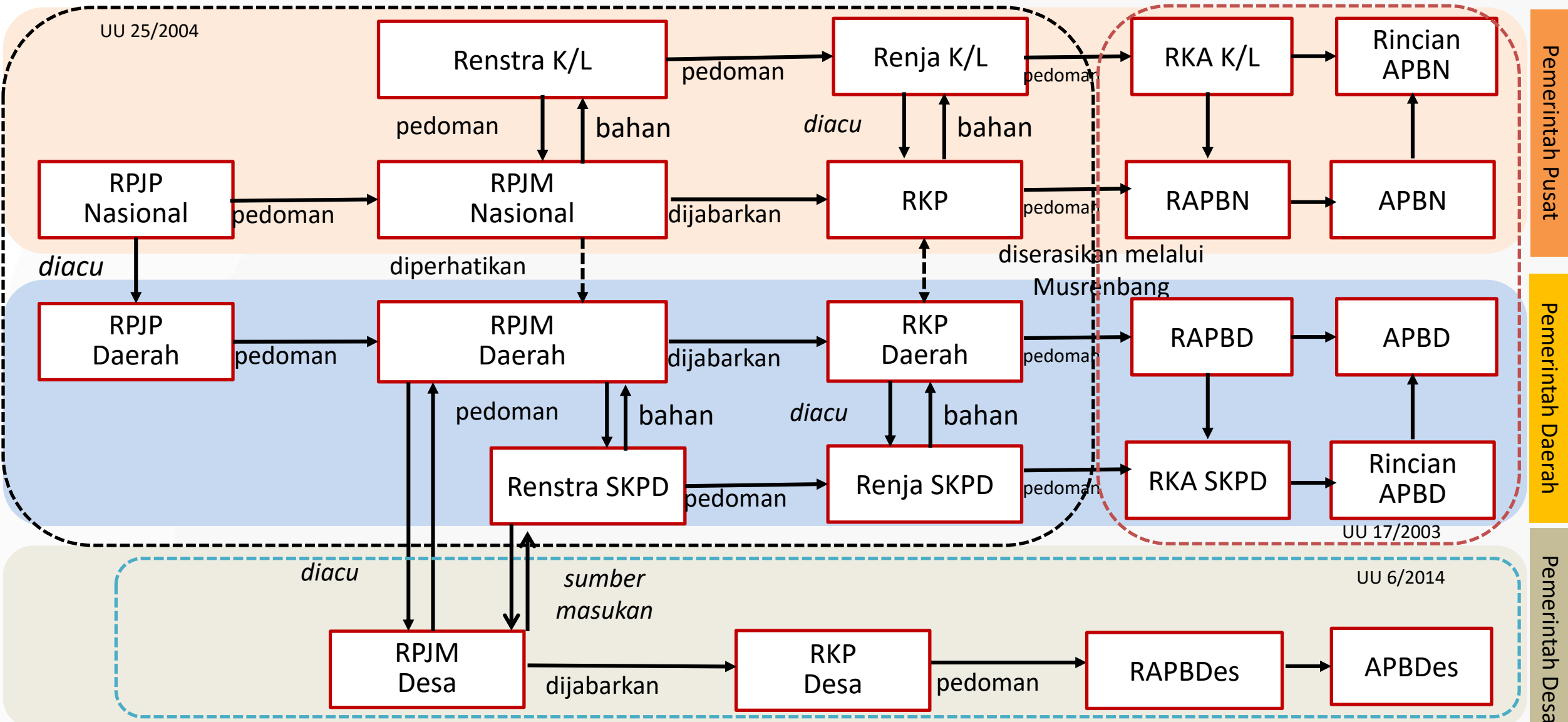
MAINSTREAMING PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN



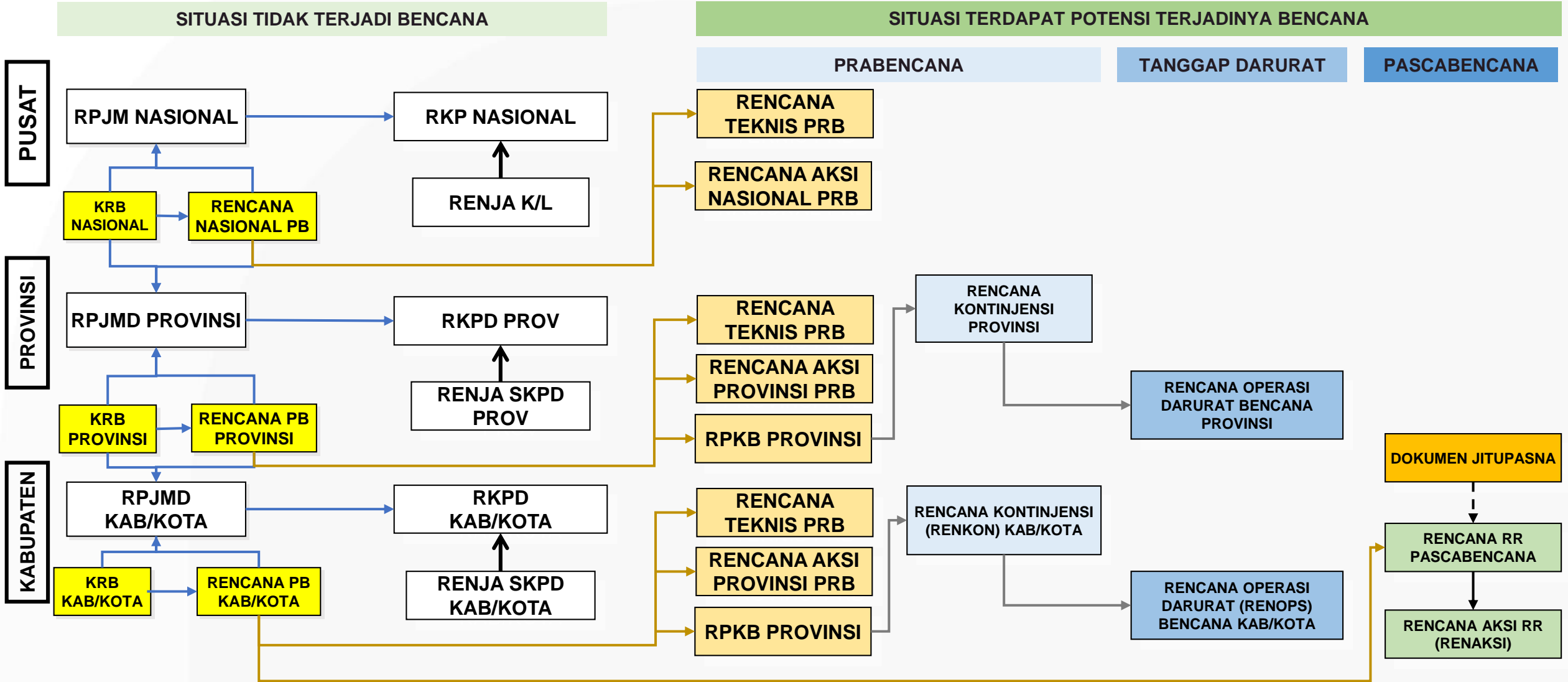
- **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**
- **Kajian Risiko Bencana Indonesia**
- **Penyusunan Indeks dan Peta Risiko Bencana**
- **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**



PENYELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

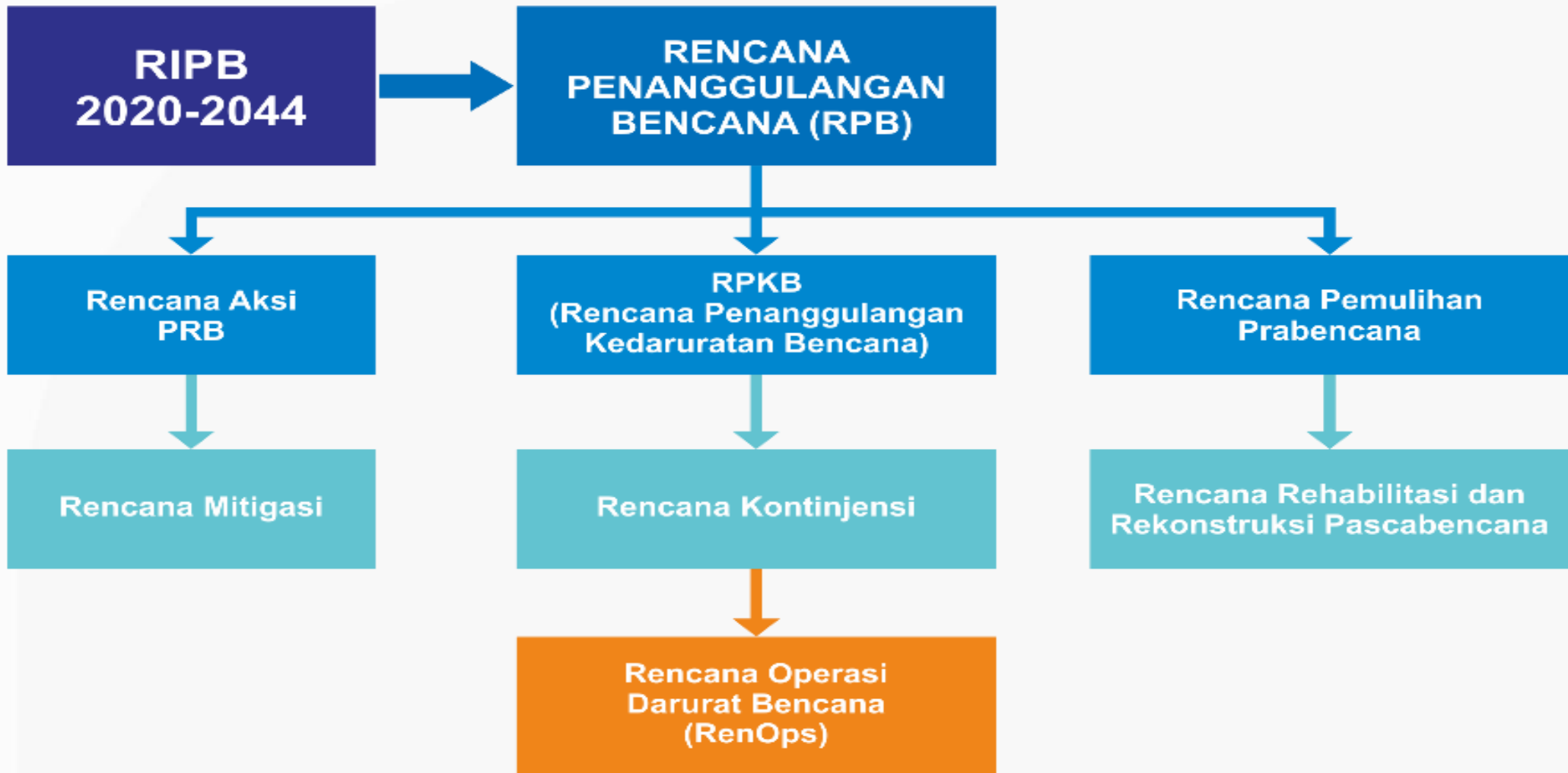


KEDUDUKAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM DOKUMEN JANGKA PENDEK





KAITAN RIPB DENGAN PERENCANAAN PB LAINNYA





DOKUMEN PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH

DOKUMEN	FASE	JANGKA WAKTU	PENYUSUN
Kajian Risiko Bencana	Pra Bencana	5 Tahunan	Pemda
Rencana Penanggulangan Bencana	Pra Bencana	5 Tahunan	Pemda
Rencana Kontinjensi	Pra Bencana	Tahunan	Pemda
Rencana Operasi	Tanggap Darurat	Tahunan	Pemda
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Pra Bencana/Tanggap Darurat	Tahunan	Pemda
DaLa/Jitupasna	Tanggap Darurat	Tanggap Darurat bencana	Pemda
R3P	Pascabencana	Pascabencana	Pemda

Dokumen perencanaan penanggulangan bencana adalah aspek penting dalam Penanggulangan bencana, hal ini karena Pemerintah Daerah (BPBD dan OPD terkait) dengan didampingi oleh BNPB Menyusun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, dan dapat digunakan pada saat kondisi bencana tertentu (pra/darurat/pasca) sesuai dengan jenis dokumen yang disusun

MEMBANGUN KERJASAMA DAN KEMITRAAN DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

- Faktor kunci: modal sosial, modal pengetahuan, modal SDA dan lingkungan, modal keuangan dan modal fisik

- Menyusun rencana pembangunan dan rencana tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana: pemulihan, penguatan dan percepatan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi
- Melakukan adaptasi dan mitigasi bencana
- Mengembangkan skema pembiayaan terintegrasi
- Mengembangkan **pengendalian dan evaluasi** (safeguarding) pembangunan.

- Memberikan dan menyebarkan **informasi, advokasi, dan umpan balik** (*feed-back*)
- Menguatkan literasi
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola

- Menghasilkan **lulusan yang unggul, tangguh dan adaptif**;
- Mengembangkan ilmu dan pengetahuan;
- Melakukan **riset dasar dan riset unggulan**; dan
- Mengembangkan **manajemen pengetahuan** (*knowledge management*) bersama Pemda, Pelaku usaha dan media

- Meningkatkan literasi, edukasi dan budaya sadar bencana berbasis komunitas dan desa
- Menjaga, menguatkan dan mengembangkan **solidaritas, kerjasama dan gotong royong**
- Menguatkan semangat dan optimisme

- Mengembangkan usaha yang **adil, menguntungkan dan berkelanjutan**
- Memperluas **kerjasama dan kemitraan dalam rantai nilai**: produksi, pengolahan, distribusi, promosi dan perdagangan.
- Meningkatkan **edukasi, literasi dan budaya sadar bencana**
- Memasok kebutuhan pokok saat tanggap darurat.



KONDISI EKSISTING KERANGKA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

KERANGKA PERENCANAAN

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 (Perpres 18/2020)
- Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 (Perpres No.87/2020)
- Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024
- Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

KERANGKA KELEMBAGAAN

Pusat (Kelembagaan Kunci)

- BNPB
- BMKG
- Basarnas
- BIG
- Kementerian PPN/Bappenas
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian PUPR
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pendidikan
- Kementerian Sosial
- Kementerian ATR/BPN
- Kementerian LHK

Daerah

- BPBD
- Bappeda
- OPD terkait

KERANGKA REGULASI

- UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
- UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 6/2018 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
- PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- PP 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- Permendagri 101/2018 tentang SPM Sub-urusan Bencana Kab/Kota

KERANGKA PEMBIAYAAN

- PP No. 22/2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- PP No. 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan PLN dan Penerimaan Hibah
- Dana Siap Pakai (DSP)
- Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR)
- APBN
- APBD
- Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
- Pooling Fund Bencana (Perpres 75 tahun 2021)
- Dana CSR
- Kolaborasi Masyarakat

SPM-Sub Urusan Bencana

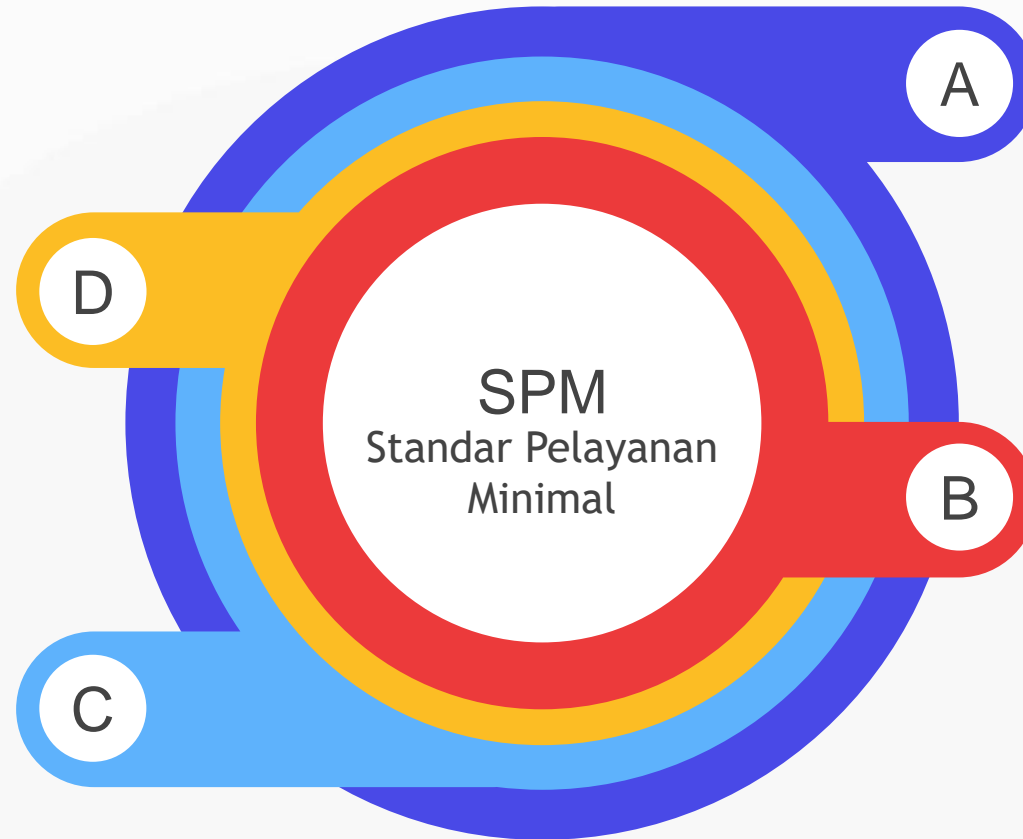
PERENCANAAN SPM BERBASIS “THIS”

Tematik

SPM merupakan urusan wajib dasar sehingga harus menjadi fokus prioritas pembangunan daerah

Spasial

Wilayah atau fokus intervensi SPM harus jelas. Apabila anggaran terbatas, penerima layanan difokuskan kepada penerima yang paling prioritas, (misal: masyarakat miskin dan rentan, dll)



Holistik

Pelaksanaan SPM terpetakan jelas hulu dan hilirnya termasuk pemetaan keterlibatan aktor-aktornya (pemerintah dan non pemerintah)

Integratif

SPM dapat didukung dari berbagai macam sumber pembiayaan



Collaborative Governance



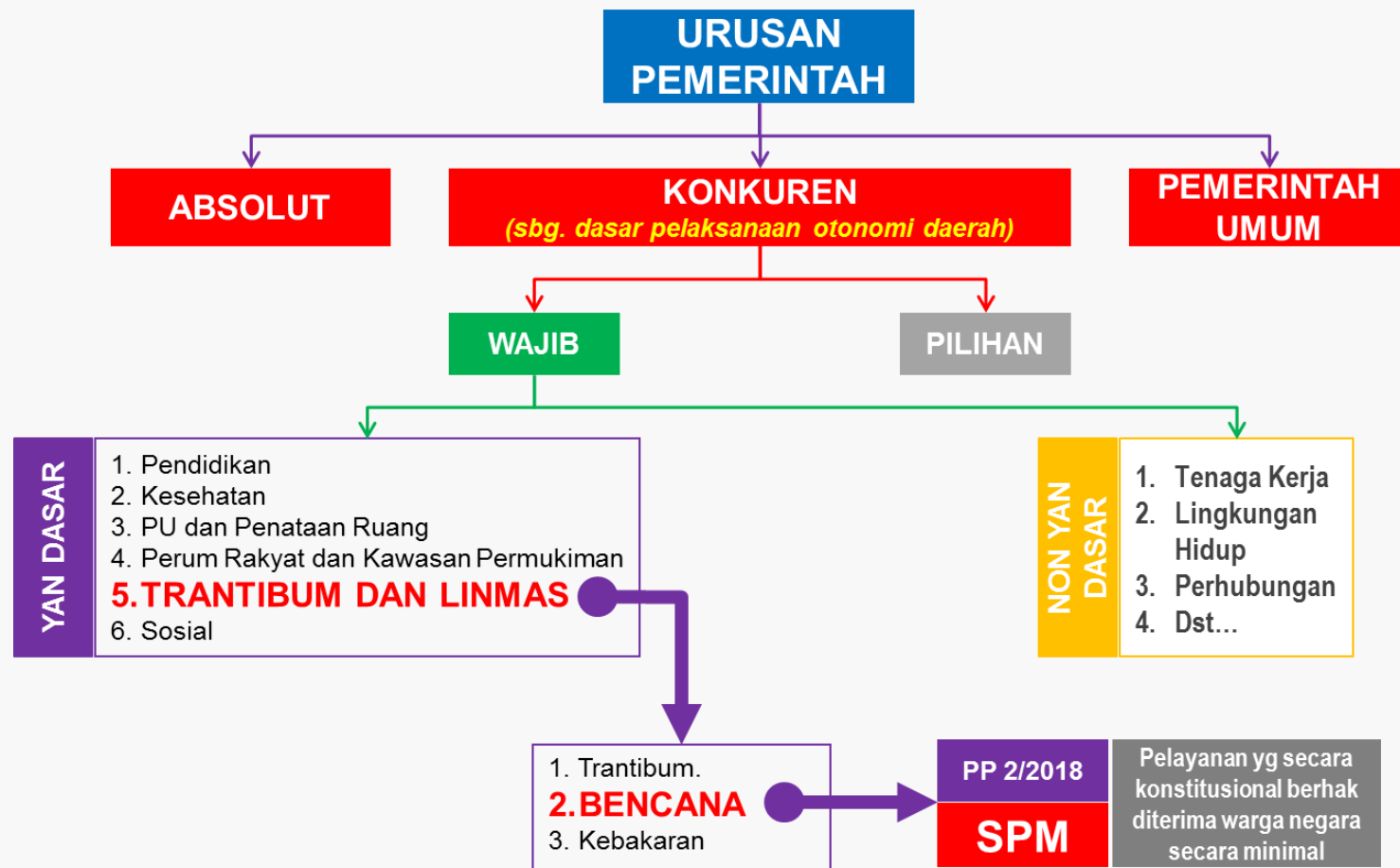
PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAI URUSAN WAJIB DAERAH



Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana



PENANGGULANGAN BENCANA DALAM SPM SUB URUSAN BENCANA



Permendagri 101 tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana menggaris bawahi **Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi** sebagai salah satu dokumen wajib dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah

Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Kepmendagri Nomor: 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah



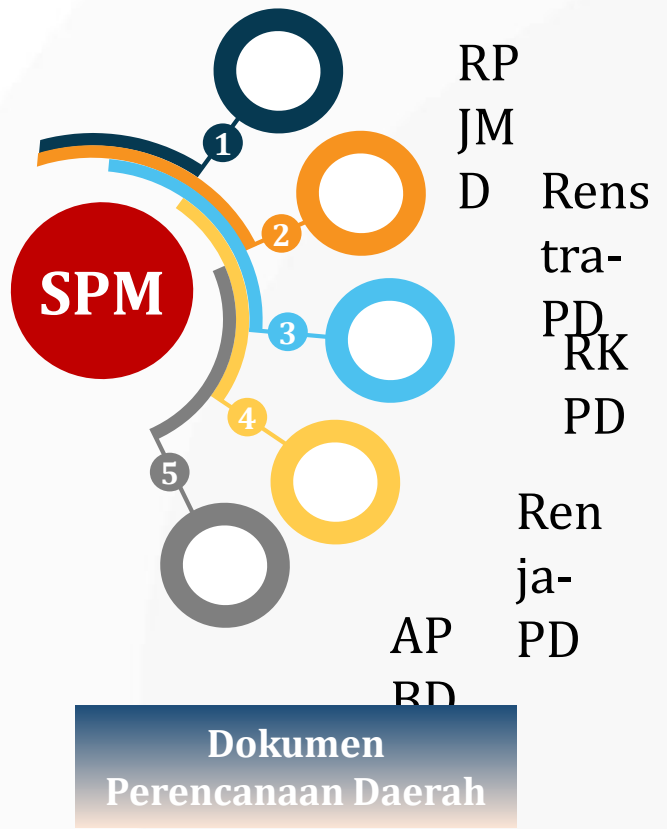
1. PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA
2. SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA (PER JENIS BENCANA)
3. PENYEDIAAN DAN PEMSANGAN RAMBU EVAKUASI DAN PAPAN INFORMASI KEBENCANAAN

1. PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI;
2. PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA;
3. PEMBUATAN RENCANA KONTINJENSI;
4. GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA;
5. PENGENDALIAN OPERASI DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA;
6. PENYEDIAAN DAN PENGOPERASIAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA;
7. PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

1. PENGKAJIAN CEPAT;
2. PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA;
3. AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA



PENYUSUNAN RENCANA: INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH



Proses SPM

- Jenis, Mutu, dan Penrima Pelayanan Dasar**
1. Identifikasi penerima;
 2. Identifikasi ketersediaan barang/jasa kebutuhan dasar;
 3. Identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Materi Yang Diatur Dalam
PP 2/2018 SPM

Proses Perencanaan

Integrasi ke dalam dokumen perencanaan (Program Pemenuhan SPM).

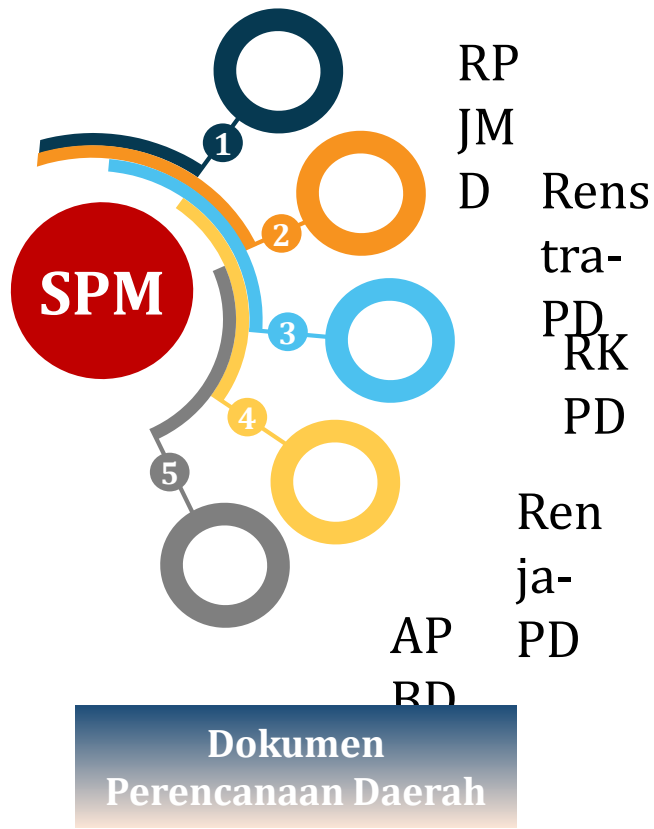
Peraturan Menteri Dalam Negeri

Proses Penganggaran

Integrasi ke dalam dokumen anggaran (Program Pemenuhan ...).

Diatur dalam Regulasi

PENYUSUNAN RENCANA: INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH



Proses SPM

Jenis, Mutu, dan Penrima Pelayanan Dasar

1. Identifikasi penerima;
2. Identifikasi ketersediaan barang/jasa kebutuhan dasar;
3. Identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Materi Yang Diatur Dalam PP 2/2018 SPM

Proses Perencanaan

Integrasi ke dalam dokumen perencanaan (Program Pemenuhan SPM).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

Proses Penganggaran

Integrasi ke dalam dokumen anggaran (Program Pemenuhan SPM).

Diatur dalam Peraturan Penganggaran Daerah

Sumber: Kemendagri, 2021

KESIMPULAN

Penutup dan Kesimpulan

1. Pemerintah daerah (OPD) dan Pemerintah pusat (K/L) dan sejak awal harus **bekerjasama** dalam pendataan, pengkajian, perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. **Pengintegrasian Dokumen Perencanaan PB dalam perencanaan pembangunan daerah** melalui perumusan visi dan misi Kepala Daerah.
3. Bappeda dan BPBD harus bekerjasama melakukan **identifikasi, analisis dan perkiraan (proyeksi)** risiko bencana di setiap daerah.
4. **Penguatan manajemen data dan informasi, dan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) tentang bencana** untuk mendukung penyusunan perencanaan kebijakan penanggulangan bencana → **pengenalan siklus dan pola akan meningkatkan kualitas perencanaan** penanganan bencana.
5. **Meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama akses masyarakat pada rawan bencana dan perubahan iklim bencana** terhadap layanan publik informasi kebencanaan.
6. Bappeda dan BPBD mengawal **pengarusutamaan pengurangan risiko bencana** dalam penyusunan **RPJMD, RKPD, RPB dan RENSTRA OPD**.



TERIMA KASIH

